



## PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN Ekstrem DI BALI MENGGUNAKAN METODE ANALISIS SWOT: STRATEGI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### *THE ROLE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN ALLEVIATING EXTREME POVERTY IN BALI USING THE SWOT ANALYSIS METHOD: STRATEGY AND POLICY IMPLICATIONS*

Naskah disubmit: 18 Februari 2024 | Revisi: 20 Maret 2024 | diterima: 17 April 2024

**I Pande Made Ariawan\***

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali

\*Penulis Korespondensi:  
mdariawan99@gmail.com

#### **Abstrak**

Pertemuan koordinasi Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023 di Bali diadakan untuk mengevaluasi program pengurangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, merumuskan strategi terpadu lintas sektor, dan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Meskipun tingkat kemiskinan di Bali relatif rendah secara nasional, sebesar 4,25%, dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di provinsi ini stagnan di atas 4%, menunjukkan perlunya strategi kolaboratif baru. Sesuai mandat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan instruksi Presiden yang menyerukan pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Maka perlu melibatkan tim nasional, berkolaborasi dengan MDA Provinsi Bali, serta mengintegrasikan kebijakan kearifan lokal. Data kemiskinan disajikan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, termasuk garis kemiskinan pangan dan non-pangan, serta data mikro dan makro. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan selama periode pandemi, namun telah terjadi pemulihan sejak itu. Garis kemiskinan non-pangan berperan semakin besar dalam memengaruhi kondisi kemiskinan. Lima komoditas utama pangan dan non-pangan yang berkontribusi pada garis kemiskinan di Bali telah diidentifikasi. Terdapat informasi tentang kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di provinsi ini. Analisis mencakup ketidaksetaraan pendapatan dan distribusi pengeluaran penduduk. Kesimpulannya bahwa ketidaksetaraan pendapatan di Bali berada dalam kategori rendah menurut standar Bank Dunia. Meskipun masih terdapat kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten, tingkatnya relatif rendah. Bantuan sosial dan pendanaan telah didistribusikan, dan konsep kemiskinan di Bali mencakup aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Akhirnya, *policy paper* ini menekankan bahwa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta program/bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan *Dana Dunia Hindu* untuk bantuan pendidikan dan penguatan *Pasraman* non formal melalui inovasi tangan umat sebagai peran Kementerian Agama.

**Kata Kunci:** Kemiskinan Ekstrem, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Basic Needs Approach*, Ketimpangan Pendapatan, *Dana Dunia Hindu*, *Pasraman* Nonformal, “Tangan Umat”

#### **Abstract**

In 2023, significant meeting was held in Bali by the Provincial and District/City Poverty Reduction Coordination Team. The aim was to assess the progress of poverty reduction programs, devise integrated strategies across sectors, and expedite poverty alleviation efforts in the region. Despite a relatively low national poverty rate of 4.25%, Bali has seen stagnation above 4% over the past five years, signaling the need for fresh collaborative strategies. Aligned with the Sustainable Development Goals and President's directive to eradicate extreme poverty by 2024, it's crucial to engage the national team, collaborate with Bali Province MDA, and incorporate local wisdom policies. Poverty data is presented using a Basic Needs Approach, encompassing food and non-food poverty lines, along with micro and macro data. The analysis reveals an uptick in poverty during the pandemic, followed by a recovery. The non-food poverty line increasingly influences poverty conditions. Five key food non-food commodities contributing to Bali's poverty line have been identified. The province's poverty depth and severity are also reported. The analysis includes income inequality and population expenditure distribution, concluding that income inequality in Bali is low by World Bank standards. Despite pockets of extreme poverty in some districts, the overall level is relatively low. Social assistance and funding have been distributed, and Bali's concept of poverty encompasses economic, socio-cultural, and environmental aspects<sup>1</sup>. Finally, this policy paper underscores that increasing access and quality of educational services as well as education programs/assistance are right on target through the use of Hindu Dunia Fund for education assistance and strengthening non-formal *Pasraman* through innovation of “Tangan Umat” as the role of the Ministry of Religious Affairs.

**Keywords:** Extreme Poverty, Sustainable Development Goals, *Basic Needs Approach*, Income Inequality, Social Assistance, Hindu Dunia Fund, Nonformal *Pasraman*, “Tangan Umat”

## PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi tantangan serius, tergambar dalam *Sustainable Development Goals* yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi, masih ada sebagian penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pulau Bali, meskipun terkenal dengan keindahan alamnya, juga menghadapi masalah kemiskinan ekstrem, terutama setelah dampak negatif pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata yang vital.

Kementerian Agama (Kemenag) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan urusan agama dan keagamaan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Kemenag memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti program pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada tahun 2023, tema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Agama fokus pada pengentasan kemiskinan.

Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem oleh Kementerian Agama mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta program/bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Meskipun demikian, perspektif kemiskinan ekstrem di Bali menunjukkan kompleksitas yang perlu digali lebih dalam, terutama dalam faktor kultur budaya, seperti peringkat ketiga faktor Upacara Agama pada kategori Bukan Makanan.

Pada aspek peran *stakeholder*, terdapat kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Agama, tim nasional, MDA Provinsi Bali, dan kebijakan kearifan lokal. Pembagian peran ini belum optimal, sehingga implementasi program pengentasan kemiskinan ekstrem masih mengalami hambatan. Oleh karena itu, dalam Pertemuan koordinasi Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023 di Bali telah diadakan untuk mengevaluasi program pengurangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, merumuskan strategi terpadu lintas sektor, dan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Pergub terbaru memperkuat eksistensi Majelis Daerah Adat (MDA) dan memberikan pengaruh signifikan pada urusan penerbitan perarem dan hukum adat di Bali. Kemenag diharapkan dapat berkolaborasi lebih intensif dengan lembaga umat, MDA, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam mengatur kegiatan sosial keagamaan yang dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Dalam target sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Renstra 2020-2024 untuk memperkuat peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melalui fasilitasi dan forum dialog antar umat beragama. Namun, perlu dicermati bahwa kualitas pembinaan umat beragama serta sarana pendukung pelayanan keagamaan yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat juga perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi kemiskinan ekstrem di Bali, mengidentifikasi faktor penyebab, dan merumuskan solusi strategis. Tantangan ketidakmerataan, dampak Covid-19, dan evaluasi ulang terhadap strategi penanggulangan perlu menjadi perhatian utama.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Bali adalah:

1. Target SDGs untuk penurunan kemiskinan ekstrem di Bali (0% pada tahun 2024) belum tercapai dimana data menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di Bali masih stagnan di atas 4%
2. Dampak fluktuasi ekonomi dan pandemi Covid-19, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di Bali;
3. Strategi penanggulangan kemiskinan yang belum komprehensif dan dapat mengatasi pergeseran dari kemiskinan berbasis pangan ke kemiskinan non-pangan di Bali;

Dengan merumuskan permasalahan tersebut diatas diperoleh problem statement yakni ketidakcapaian target SDGs sebesar 0% kemiskinan ekstrem di Bali pada tahun 2024 akibat lemahnya strategi penanggulangan dampak fluktuasi ekonomi dan terutama pandemi Covid-19 secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan ekstrem di Bali. Maka kita dapat memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara lebih mendalam dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali untuk mencapai target SDGs dalam penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0%

di Provinsi Bali tahun 2024 serta mencari solusi yang tepat guna mengatasi masalah tersebut secara berkelanjutan.

### Tujuan dan Manfaat

Tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bali adalah:

1. Menganalisis dampak kemiskinan ekstrem di Bali:  
Menyajikan analisis mendalam terkait dampak kemiskinan ekstrem di Pulau Bali, khususnya setelah dampak negatif pandemi Covid-19 pada meningkatnya kemiskinan ekstrem. Tujuan ini mencakup pemahaman kondisi masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi, pendidikan, dan aspek sosial lainnya.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab dan kompleksitas kemiskinan:  
Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan ekstrem di Bali, dengan memfokuskan pada kompleksitas kultural dan sosial, seperti peringkat ke-3 faktor Upacara Agama pada kategori Bukan Makanan. Tujuan ini adalah memberikan landasan pemahaman yang mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
3. Mengevaluasi kendala dan tantangan dalam implementasi program:  
Mengevaluasi kendala dan tantangan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Agama di Bali. Memfokuskan pada aspek peran *stakeholder* dan koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi hambatan yang dapat diatasi dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi:  
Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, non-pemerintah (MDA, PHDI), serta pemangku kepentingan terkait dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Bali. Tujuannya adalah menghindari tumpang tindih program, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Adapun manfaat penulisan ini adalah memberikan pemahaman dan penanganan kemiskinan ekstrem di Bali melalui pendekatan kebijakan yang terstruktur. Dengan menganalisis peran Kementerian Agama dalam konteks ini, tulisan ini tidak hanya memberikan gambaran mendalam tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, tercapai, dapat dipercaya, dan berbatas waktu (SMART).

Dengan menggali peran aktif Kementerian Agama dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan memberikan panduan yang berguna bagi *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan di Bali. Tulisan ini dapat digunakan sebagai landasan kebijakan yang efektif, mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dan mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem sesuai *Sustainable Development Goals* hingga tahun 2024.

## Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam *policy paper* ini, kami akan membahas beberapa teori yang relevan untuk memahami kemiskinan ekstrem dan akar masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bali. Tinjauan pustaka ini akan mencakup teori kemiskinan struktural, teori siklus kemiskinan, dan teori kapabilitas.

### *Teori Kemiskinan Struktural*

Teori kemiskinan struktural menyoroti peran struktur ekonomi dan sosial dalam menciptakan dan memelihara kemiskinan. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya akibat pilihan individu, melainkan juga dampak dari ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Dalam konteks Bali, struktur ekonomi yang sangat tergantung pada sektor pariwisata dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Bali adalah destinasi pariwisata terkenal, namun pendapatan dari sektor ini tidak selalu merata. Banyak penduduk Bali yang bergantung pada pariwisata, terutama dalam pekerjaan informal seperti pedagang kecil atau pekerja harian, yang cenderung memiliki pendapatan rendah dan tidak ada jaminan sosial. Oleh karena itu, teori kemiskinan struktural dapat membantu kita memahami bagaimana ketidaksetaraan dalam struktur ekonomi berkontribusi pada kemiskinan ekstrem di Bali.

### *Teori Siklus Kemiskinan*

Teori siklus kemiskinan menggambarkan bagaimana kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit diputuskan. Ini berfokus pada bagaimana individu atau keluarga yang sudah miskin dapat terjebak dalam

kemiskinan karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan yang tidak stabil, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dalam konteks Bali, terdapat kelompok masyarakat yang rentan terjebak dalam siklus kemiskinan.

Misalnya, keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mungkin kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga generasi berikutnya juga berisiko mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori siklus kemiskinan dapat membantu merumuskan kebijakan yang dapat memutuskan siklus kemiskinan ini dan memberikan peluang yang lebih baik bagi keluarga miskin di Bali.

#### *Teori Kapabilitas*

Teori kapabilitas dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum dan menekankan pentingnya memberikan individu kemampuan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Teori ini lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar; itu berbicara tentang memberikan orang kebebasan untuk memilih dan mencapai apa yang mereka anggap sebagai kehidupan yang bermakna.

#### *Penanganan Kemiskinan Ekstrem*

Penanganan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus utama pemerintah di banyak negara di seluruh dunia. Upaya ini sering kali melibatkan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Program-program ini dapat mencakup bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin, pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan

dan layanan kesehatan yang terjangkau, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang terpinggirkan.

Di tingkat global, PBB telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup target pengentasan kemiskinan, termasuk target untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030. Ini mencerminkan komitmen dunia dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan.

Program Pemerintah Terkait; Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satu program yang paling terkenal adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin dengan syarat-syarat tertentu, seperti menjaga kehadiran anak-anak mereka di sekolah dan mengakses layanan kesehatan. Selain itu, program-program lainnya seperti Bantuan Sosial (Bansos) juga berperan dalam memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang membutuhkan.

Konteks Bali; Pulau Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai tujuan pariwisata utama. Sebagai daerah dengan perekonomian yang sangat tergantung pada sektor pariwisata, Bali sangat terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Penurunan drastis dalam kunjungan wisatawan internasional telah menyebabkan banyak pekerja di sektor pariwisata kehilangan mata pencaharian mereka, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan di provinsi ini. Meskipun Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada beberapa provinsi lain di



Indonesia, stagnasi angka kemiskinan di atas 4% selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi.

Dalam konteks Bali yang unik ini, perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan aspek budaya, ekonomi, dan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini harus mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Bali dan menggabungkan solusi yang relevan dengan konteks budaya dan ekonomi lokal.

## METODOLOGI

Metode atau analisis data yang digunakan dalam *policy paper* ini, termasuk sumber data dan teknik analisis.

### Metode Kualitatif

1. Pemahaman Konsep Kemiskinan: Metode ini mencakup analisis literatur dan studi konseptual tentang kemiskinan dengan fokus pada *Basic Needs Approach*. Penelitian literatur dan wawancara dengan ahli dapat membantu dalam memahami konsep kemiskinan dan kerangka kerja dasar untuk mengentaskannya.
2. Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Distribusi Pengeluaran: Pendekatan kualitatif dapat melibatkan wawancara dengan individu atau kelompok yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan wawasan tentang ketimpangan pendapatan dan distribusi pengeluaran. *Focus Group Discussions* (FGD) juga dapat digunakan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam tentang ketimpangan sosial ekonomi.

3. Analisis Kemiskinan Ekstrem: Analisis tentang kemiskinan ekstrem dapat melibatkan wawancara dengan individu atau kelompok yang berada di tingkat kemiskinan ekstrem untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka secara lebih mendalam.
4. Studi Kasus: Melakukan studi kasus di Bali untuk memahami situasi dan tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

### Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Kemiskinan Makro: Data kemiskinan makro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS digunakan dalam analisis kuantitatif. Data ini dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik statistik.
2. Pengumpulan Data Kemiskinan Mikro: Data kemiskinan mikro dari berbagai sumber seperti PSE, PKS, BDT, dan kegiatan RSO-Seksi digunakan untuk analisis kuantitatif. Data ini dapat dianalisis dengan teknik statistik yang sesuai.
3. Analisis Data Kemiskinan: Data kemiskinan dianalisis dengan menggunakan konsep *Basic Needs Approach*. Ini mencakup penghitungan indeks kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.
4. Analisis Profil Kemiskinan Bali: Data digunakan untuk menganalisis profil kemiskinan di Provinsi Bali, termasuk perubahan tingkat kemiskinan seiring waktu, pengaruh pandemi Covid-19, tingkat kedalaman, dan keparahan

kemiskinan. Analisis ini dapat mencakup deskripsi statistik, grafik, dan perbandingan.

5. Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Distribusi Pengeluaran: Data pendapatan dan pengeluaran dianalisis untuk memahami tingkat ketimpangan sosial ekonomi di Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali, sebuah destinasi pariwisata terkenal di Indonesia, memiliki sisi lain yang kurang dikenal oleh banyak orang, yaitu masalah kemiskinan ekstrem. Meskipun dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya, Bali juga memiliki tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kementerian Agama, sebagai salah satu lembaga pemerintah di Indonesia, memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali. Dalam *policy paper* ini, kami akan mengeksplorasi hasil analisis terkait masalah kemiskinan ekstrem di Bali, strategi yang dapat diadopsi oleh Kementerian Agama, dan implikasi kebijakan yang relevan.

### Profil Kemiskinan di Bali

Untuk memahami peran Kementerian Agama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali, penting untuk memahami profil kemiskinan di wilayah tersebut. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bali mengalami fluktuasi seiring waktu, dengan dampak pandemi Covid-19 yang signifikan. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Bali mencapai 3,51%, yang merupakan angka terendah dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi.

Namun, sejak munculnya pandemi, tingkat kemiskinan di Bali mulai meningkat. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan naik menjadi 3,78%, dan terus meningkat hingga mencapai 4,57% pada September 2021. Meskipun ada pemulihan ekonomi yang terlihat pada Maret 2022, dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 4,25%, ini masih di atas tingkat sebelum pandemi.

Pada Maret 2023, Provinsi Bali mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 193,78 ribu orang, atau setara dengan 4,25 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 0,28 persen poin dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang mencapai 4,53 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi di Provinsi Bali. Bahkan, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 berada di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Lebih menariknya lagi, Provinsi Bali berhasil menduduki peringkat pertama secara nasional dalam hal persentase kemiskinan terendah. Hal ini menggambarkan upaya serius pemerintah dan *stakeholders* dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali juga diikuti dengan peningkatan Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2023, yang mencapai Rp 529.643 per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan dan non-makanan.

Selain itu, penting untuk memperhatikan kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Bali. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami peningkatan

pada semua tingkat, baik perkotaan, perdesaan, maupun gabungan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Bali lebih mendekati garis kemiskinan, yang merupakan indikasi positif. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan yang menunjukkan variasi pengeluaran di antara penduduk miskin. Ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam pendapatan di kalangan penduduk miskin.

Selanjutnya, data ketimpangan di Provinsi Bali menurut klasifikasi Bank Dunia menunjukkan perbaikan yang signifikan. Terdapat ketiga kategori ketimpangan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penurunan tingkat ketimpangan menunjukkan adanya usaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara penduduk, yang merupakan hal positif dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Penting untuk dicatat bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata. Berbagai faktor, seperti: pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, lingkungan, dan aspek sosial juga berperan penting dalam memahami kemiskinan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki pendidikan terbatas, dan sebagian besar sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Namun, masih ada beberapa penduduk miskin usia 13-15 tahun yang belum sekolah.

Tingkat pengangguran juga berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi, dengan sekitar 39,22 persen penduduk miskin yang tidak bekerja. Meskipun demikian, hampir seluruh penduduk miskin di Provinsi Bali sudah menggunakan air layak dan memiliki

jamban sendiri, yang merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meskipun dengan dampak yang mungkin relatif kecil. Selain itu, Provinsi Bali juga berhasil mencapai tingkat stunting yang sangat rendah, berada di bawah angka nasional, menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Selain itu, penelitian juga mencatat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Bali tergolong rendah, meskipun masih ada ketimpangan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa kemiskinan ekstrem di Bali masih ada meskipun dalam jumlah yang terbatas. Pengentasan kemiskinan ekstrem bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, individu, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem harus mencakup berbagai aspek ini. Pendidikan, pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan yang layak, serta penguatan infrastruktur dan jaringan sosial menjadi kunci dalam mengatasi masalah kemiskinan secara holistik di Provinsi Bali.

Seiring dengan perbaikan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan Provinsi Bali dapat terus mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk



mengentaskan kemiskinan ekstrem agar sesuai dengan target nasional pada tahun 2024.

### Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menjadi fokus analisis. Kedalaman kemiskinan mengacu pada jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga miskin. Di Bali, kedalaman kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,034, sedangkan di pedesaan, jaraknya berkurang sebesar 0,117 dari September 2022. Secara total, kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,01%, menunjukkan bahwa kemiskinan di Bali cenderung tidak terlalu dalam.

Keparahan kemiskinan, di sisi lain, mencerminkan variasi dalam pengeluaran antara rumah tangga miskin. Keparahan ini dapat menjadi indikator penting dalam menilai seberapa sulit mengangkat keluarga dari kemiskinan. Di Bali, keparahan kemiskinan tidak mengalami perubahan signifikan dari September 2022 hingga Maret 2023, tetap berada pada 0,102.

### Ketimpangan Pendapatan dan Distribusi Pengeluaran

Ketimpangan pendapatan dan distribusi pengeluaran adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan diukur dengan mengidentifikasi berapa banyak pendapatan yang dikontrol oleh sebagian kecil populasi. Dalam analisis ini, ketimpangan pendapatan di Bali diidentifikasi sebagai rendah menurut indeks ketimpangan pendapatan. Namun, distribusi pengeluaran penduduk

menunjukkan bahwa 40% terbawah menerima 18,7% dari total pengeluaran, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran yang sedang.

### Kemiskinan Ekstrem di Bali

Kemiskinan ekstrem adalah tantangan yang perlu diatasi dengan serius di Bali. Data menunjukkan bahwa, meskipun jumlahnya tidak besar, kemiskinan ekstrem masih ada di beberapa kabupaten. Terdapat dua kabupaten di Bali yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem di atas 1%, sementara kabupaten lainnya telah mencapai tingkat di bawah 1%.

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	
	2021	2022	2021	2022
Jembrana	5,06	5,30	0,42	0,66
Tabanan	5,12	5,18	0,82	0,51
Badung	2,62	2,53	0,50	0,04
Gianyar	4,85	4,70	0,36	1,65
Klungkung	5,64	6,07	1,51	0,48
Bangli	5,09	5,28	0,56	0,75
Karangasem	6,78	6,98	0,17	1,80
Buleleng	6,12	6,21	0,28	0,05
Denpasar	2,96	2,97	0,23	0,06
Provinsi Bali	4,53	4,57	0,43	0,54

Sumber: Data BPS (2023)

### Program Bantuan Sosial (Bansos) di Bali

Analisis juga mencakup evaluasi program bantuan sosial (Bansos) di Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa Bansos yang disalurkan melalui PT. POS mencapai 98% dari target. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penyediaan bantuan kepada penduduk yang membutuhkan. Sementara itu, program Bansos yang disalurkan melalui pendanaan mencapai 95%, menunjukkan tingkat yang hampir sama efisien.

Namun, penting untuk mencatat bahwa distribusi bantuan Bansos tidak sepenuhnya merata. Analisis menunjukkan bahwa sebagian kecil penerima Bansos masih termasuk dalam desil yang lebih tinggi, yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam seleksi penerima Bansos untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

### **Strategi dan Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan paparan data di atas dapat dikembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat digunakan untuk mencari akar permasalahan terkait kemiskinan di Bali di antaranya:

1. Faktor ekonomi:
  - Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi di antara penduduk miskin.
  - Rendahnya Pendapatan: Pendapatan yang rendah dari pekerjaan yang tersedia.
  - Ketidakpastian Ekonomi: Pekerjaan yang tidak stabil dan tergantung pada sektor tertentu.
  - Kesenjangan Upah: Upah yang rendah, terutama untuk perempuan.
2. Faktor individu:
  - Pendidikan Terbatas: Sebagian besar penduduk miskin memiliki pendidikan rendah, terutama SMP ke bawah.
  - Kesehatan: Masalah kesehatan yang mengganggu kemampuan untuk bekerja.
3. Faktor lingkungan:
  - Akses Terbatas: Akses terbatas ke sumber daya alam dan infrastruktur yang membatasi peluang ekonomi.
- Bencana Alam: Kerentanannya terhadap bencana alam yang dapat merusak sumber daya ekonomi.
4. Faktor sosial:
  - Tekanan Budaya: Budaya yang mendorong pengeluaran yang tidak terjangkau untuk acara adat.
  - Budaya Patriarki: Ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya dan peluang.
5. Program Bantuan Sosial (Bansos):
  - Seleksi Penerima: Masalah dalam seleksi penerima Bansos yang memastikan bantuan tepat sasaran.
  - Distribusi Merata: Distribusi Bansos yang tidak merata di antara penduduk miskin.
6. Pertumbuhan ekonomi:
  - Rendahnya Pertumbuhan: Pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam menciptakan pekerjaan baru.
  - Ketidakstabilan Ekonomi: Dampak fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.
7. Pendapatan dan distribusi:
  - Ketimpangan Pendapatan: Ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok penduduk.
  - Distribusi Pengeluaran: Distribusi pengeluaran yang tidak merata di kalangan penduduk.
8. Kemiskinan ekstrem:
  - Multidimensional: Kemiskinan ekstrem sebagai masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek.
  - Kepala Keluarga Perempuan: Kepala keluarga perempuan yang lebih rentan terhadap kemiskinan ekstrem.

9. Infrastruktur dan akses:
    - Infrastruktur Buruk: Infrastruktur yang buruk membatasi akses ke fasilitas publik.
    - Lokasi Geografis: Keterbatasan lahan pertanian dan akses ke sumber daya alam.
  10. Pendidikan dan keterampilan:
    - Pendidikan Terbatas: Akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan keterampilan.
    - Minimnya Keterampilan: Kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik.
  11. Kesehatan:
    - Kesehatan yang Buruk: Masalah kesehatan yang memengaruhi produktivitas dan biaya pengobatan.
  12. Ketidakpastian pekerjaan:
    - Bergantung pada Alam: Pekerjaan yang tergantung pada faktor-faktor alam yang tidak dapat dikendalikan.
    - PHK: Risiko kehilangan pekerjaan yang tinggi.
  13. Ketidakberdayaan:
    - Lansia dan Difabel: Ketidakberdayaan yang dialami oleh lansia dan difabel.
    - Permasalahan Kesehatan: Masalah kesehatan yang mengganggu kemampuan untuk bekerja.
  14. Ketidakmampuan:
    - Pendidikan Terbatas: Minimnya akses pendidikan dan keterampilan yang diperlukan.
    - Minimnya Informasi: Kurangnya informasi tentang peluang ekonomi.
  15. Pengaruh budaya:
    - Budaya Urutan: Budaya urutan yang memicu pengeluaran tinggi untuk acara adat.
    - Menikah Muda: Praktek menikah muda yang dapat menghambat pendidikan dan kesempatan kerja.
  16. Kepengurusan:
    - Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi di antara lembaga pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.
    - Implementasi Kebijakan: Tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif.
  17. Ketidakpastian pekerjaan:
    - Bergantung pada Alam: Pekerjaan yang tergantung pada faktor-faktor alam yang tidak dapat dikendalikan.
    - Risiko PHK: Risiko kehilangan pekerjaan yang tinggi.
  18. Pewarisan kemiskinan:
    - Kemiskinan Generasi: Pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi.
    - Lingkungan Miskin: Tinggal di lingkungan yang miskin dengan terbatasnya jaringan sosial.
- Kementerian Agama memegang peran krusial dalam mengatasi kasus kemiskinan melalui pendekatan berbasis agama. Dengan menjadi penyelenggara dan fasilitator program pendidikan agama, Kementerian Agama berkontribusi dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Pendidikan agama yang diberikan tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan keadilan.
- Melalui pengembangan program keagamaan yang terintegrasi, Kementerian Agama berupaya memberdayakan umat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, Kementerian Agama juga berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan program bantuan sosial berbasis agama, memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada kelompok yang membutuhkan, sehingga

memberikan kontribusi signifikan pada upaya pengentasan kemiskinan.

Lebih jauh, Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi kerjasama lintas sektor dengan lembaga agama dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini mencakup pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal dan kerjasama dengan lembaga keagamaan lain, seperti Majelis Daerah Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), guna merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Dengan menjadi penggerak dalam forum dialog antarumat beragama, Kementerian Agama juga menciptakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk bersamasamamerumuskan solusi dalam menghadapi tantangan kemiskinan, menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam upaya mengatasi permasalahan diatas, dapat disusun Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk peran Kementerian Agama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali sebagai berikut:

1. *Strengths* (Kekuatan):

- Adanya inovasi Tangan Umat (Ketahanan Pangan Umat) yang didukung pimpinan
- Adanya program kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem
- Mempunyai penyuluh agama PNS dan non PNS.

2. *Weaknesses* (Kelemahan):

- Kurangnya SDM yang kompeten dan profesional.
- Belum meratanya ketersediaan tenaga penyuluh yang bersedia melakukan penyuluhan.

3. *Opportunities* (Peluang):

- Regulasi pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Adanya *Dana Punia Hindu*
- Adanya Dana Desa
- Pemanfaatan *Pasraman* non formal yang melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat
- Kolaborasi dengan PTKN, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta
- Teknologi informasi yang mampu mendukung penyuluhan agama.

4. *Threat* (Tantangan):

- Anggaran yang terbatas
- Dampak pandemi.
- Ketimpangan sosial
- Resistensi masyarakat
- Krisis ekonomi
- Keterbukaan informasi publik.

Dari hasil identifikasi unsur – unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Arahkan pengembangan strategi S-O (menggunakan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk dijadikan kenyataan atau diwujudkan):

- a. Mengoptimalkan peran pemerintah melalui pembuatan regulasi untuk menanggulangi Kemiskinan melalui inovasi Tangan Umat, penggunaan *Dana Punia Hindu* pada peningkatan akses dan

- kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
- b. Membuat regulasi dan mengefektifkan *Dana Punia Hindu* untuk program yang mendukung kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
  - c. Mengefektifkan peran *Pasraman* non formal di Desa Adat untuk melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui program kegiatan yang melibatkan penyuluh agama.
  - d. Mengajak kerjasama PTKN, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mencegah dan menangani kemiskinan ekstrem.
  - e. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mendukung kegiatan penyuluh agama yang akan dilakukan di *Pasraman* non formal yang ada di desa adat.
  - f. Menggunakan regulasi sebagai dasar hukum untuk mendukung program peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
  - g. Melibatkan PTKN, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk ikut serta terlibat dalam program pengentasan kemiskinan di *Pasraman* non formal di desa adat.
  - h. Meningkatkan peran penyuluh agama dengan dukungan regulasi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.
  - i. Penyuluh agama menjalin kerjasama dengan PTKN, organisasi non-pemerintah (MDA, PHDI), dan sektor swasta untuk memberantas kemiskinan.
  - j. Penyuluh agama menggunakan Teknologi Informasi untuk mengetahui kemiskinan ekstrem.
2. Arahan pengembangan strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman):
    - a. Menyesuaikan anggaran yang ada mendukung inovasi Tangan Umat.
    - b. Menyesuaikan anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem akibat dari Dampak Pandemi, Ketimpangan Sosial, Resistensi Masyarakat, Krisis Ekonomi yang relevan dengan program kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
    - c. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mencari isu-isu kemiskinan ekstrem yang berkembang di masyarakat.
    - d. Mengefektifkan dan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melakukan program kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan terutama penanggulangan kemiskinan ekstrem.
    - e. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem akibat dari dampak pandemi, ketimpangan sosial, resistensi masyarakat, krisis ekonomi.
    - f. Menyelenggarakan program peningkatan penyuluhan agama dengan melihat informasi dan isu yang berkembang di masyarakat.
    - g. Mengefektifkan penyuluh Agama untuk melihat kondisi umat



- penanggulangan dampak pandemi, ketimpangan sosial, resistensi masyarakat, krisis ekonomi.
- h. Menyiapkan penyuluh agama yang tanggap terhadap kondisi dampak pandemi, ketimpangan sosial, resistensi masyarakat, krisis ekonomi dan mempunyai wawasan dan kepekaan sosial yang tinggi.
3. Arahan pengembangan strategi W-O (menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan):
    - a. Membuat standar SPM dan SOP untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh agama.
    - b. Memprioritaskan penggunaan lulusan sarjana untuk melakukan penyuluhan agama.
    - c. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh agama.
    - d. Menggunakan kebijakan regulasi dalam memenuhi rasio kebutuhan tenaga penyuluh.
    - e. Memanfaatkan teknologi IT untuk mendapatkan data terkait dengan kebutuhan tenaga penyuluh agama.
  4. Arahan pengembangan strategi W-T (membalik semua kelemahan itu menjadi peluang):
    - a. Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM.
    - b. Meningkatkan kualitas SDM untuk bisa membaca perubahan akibat dampak pandemi, ketimpangan sosial, resistensi masyarakat dan krisis ekonomi.
    - c. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mencari isu-isu agama dan sosial yang berkembang di masyarakat.
    - d. Memprioritaskan penyuluhan agama pada daerah yang rawan kemiskinan ekstrem.
    - e. Menyerap aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat untuk mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani dan mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem melalui penyuluhan agama.

### Alternatif Kebijakan

Dari beberapa alternatif solusi, maka dapat dikelompokkan beberapa solusi yang memiliki kesamaan sehingga isu strategis itu dapat muncul menjadi beberapa isu strategis utama. Tabel berikut menyajikan pengelompokan yang dilakukan.

No	Alternatif Solusi	Strategi Utama
1	Mengoptimalkan peran pemerintah melalui penguatan regulasi untuk menanggulangi Kemiskinan melalui penggunaan <i>Dana Punia Hindu</i> pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Implementasi <i>Dana Punia Hindu</i> pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem
	Membuat Regulasi dan mengefektifkan <i>Dana Punia Hindu</i> untuk program yang mendukung kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	
	Menggunakan regulasi sebagai dasar hukum untuk mendukung program peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	
	Menyesuaikan anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem akibat dari dampak ....	

<p>Pandemi, Ketimpangan Sosial, Resistensi Masyarakat, Krisis Ekonomi yang relevan dengan program kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mencari isu-isu kemiskinan ekstrim yang berkembang di masyarakat</p> <p>Mengefektifkan dan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melakukan program program kegiatan dan anggaran pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan terutama penanggulangan kemiskinan ekstrem</p>		<p>Penyuluh agama menjalin kerjasama dengan PTKN, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memberantas kemiskinan</p> <p>Penyuluh agama menggunakan Teknologi Informasi untuk mengetahui kemiskinan ekstrem</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem akibat dari Dampak Pandemi, Ketimpangan Sosial, Resistensi Masyarakat, Krisis Ekonomi</p> <p>Menyelenggarakan program peningkatan penyuluhan agama dengan melihat informasi dan isu yang berkembang di masyarakat</p> <p>Mengefektifkan penyuluh Agama untuk melihat kondisi umat penanggulangan Dampak Pandemi, Ketimpangan Sosial, Resistensi Masyarakat, Krisis Ekonomi</p> <p>Menyiapkan penyuluh agama yang tanggap terhadap kondisi Dampak Pandemi, Ketimpangan Sosial, Resistensi Masyarakat, Krisis Ekonomi dan mempunyai wawasan dan kepekaan sosial yang tinggi.</p> <p>Membuat standar SPM dan SOP untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh agama</p> <p>Memprioritaskan penggunaan lulusan sarjana untuk melakukan penyuluhan agama</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh agama</p>
<p>2 Menyesuaikan anggaran yang ada mendukung inovasi Tangan Umat</p> <p>Mengefektifkan peran <i>Pasraman</i> non formal di Desa Adat untuk melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui program kegiatan yang melibatkan penyuluh agama</p> <p>Mengajak kerjasama PTKN, organisasi non-pemerintah (MDA dan PHDI), dan sektor swasta dalam mencegah dan menangani Kemiskinan Ekstrem</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mendukung kegiatan penyuluh agama yang akan dilakukan di <i>Pasraman</i> non formal yang ada di desa adat.</p> <p>Melibatkan PTKN, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk ikut serta terlibat dalam program pengentasan kemiskinan di <i>Pasraman</i> non formal di desa adat</p> <p>Meningkatkan peran penyuluh agama dengan dukungan regulasi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan</p>	<p>Menguatkan peran <i>Pasraman</i> non formal di Desa Adat melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui inovasi Tangan umat (Ketahanan Pangan umat) melalui program kegiatan yang melibatkan penyuluh agama bekerjasama PTKN, organisasi non-pemerintah (MDA dan PHDI), dan sektor swasta</p>	

Menggunakan kebijakan regulasi dalam memenuhi rasio kebutuhan tenaga penyuluh

Memanfaatkan teknologi IT untuk mendapatkan data terkait dengan kebutuhan tenaga penyuluh agama

Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM

Meningkatkan kualitas SDM untuk bisa membaca perubahan akibat dampak pandemi, ketimpangan sosial, resistensi masyarakat dan krisis ekonomi

Mengoptimalkan penggunaan Teknologi untuk mencari isu-isu agama dan sosial yang berkembang di masyarakat

Memprioritaskan penyuluhan agama pada daerah yang rawan Kemiskinan Ekstrem

Menyerap aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat untuk mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani dan mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem melalui penyuluhan agama

Dalam hasil pengelompokan beberapa kesamaan alternatif solusi, maka muncul 2 (dua) strategi utama dalam rangka mencapai tujuan, yaitu:

1. Implementasi *Dana Punia Hindu* pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Melalui PMA Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana punia yang dapat digunakan untuk Bantuan Sosial pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem seperti beasiswa bagi generasi Hindu, pemberian bantuan modal usaha.

2. Memperkuat peran *Pasraman* non formal di Desa Adat melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui inovasi Tangan Umat (Ketahanan Pangan Umat) melalui program kegiatan yang melibatkan penyuluh agama bekerjasama PTKN, PHDI, MDA, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Langkah selanjutnya adalah memilih strategi utama yang akan dijalankan dengan kerangka waktu dan tujuan yang hendak dicapai. Metode yang akan digunakan dalam kajian ini metode *Bardach*. Metode *Bardach* tidak jauh berbeda dengan USG, hanya kriteria penilaiannya dilihat dari beberapa aspek pokok yakni:

1. *Technical feasibility* (Aspek teknis), mengukur apakah keluaran dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dalam konteks teknis.
2. *Economic and financial possibility* (Ekonomi), mengukur evaluasi ekonomis dari kebijakan/program: biaya, keuntungan, *change-in net worth*).
3. *Political viability* (politik) mengukur fisibilitas politis.
4. *Administrative operability* (administratif) mengukur evaluasi administratif dalam kemungkinan implementasi kebijakan/program..

Kriteria penilaian yang digunakan dalam metode bardach adalah dengan memberikan penilaian melalui rangking dengan *score* 1 - 10. Strategi ini memiliki pengaruh yang paling besar terhadap penanganan masalah penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yang

mana dengan metode ini akan diberikan bobot yang terbesar pada masing-masing aspek sebagaimana tabel berikut:

No	Kriteria	Bo- bot	Strategi 2		Strategi 1	
			Nilai 5	Indeks (2 x 5)	Nilai 7	Indeks (2 x 7)
1	<i>Technical Feasibility</i>	40	9	360	7	280
2	<i>Economic and Financial Possibility</i>	30	8	240	6	180
3	<i>Political Viability</i>	20	6	120	8	160
4	<i>Administrative Operability</i>	10	8	80	4	40
TOTAL		100		830		890

Dari hasil pembobotan ranking di atas, maka telah dipilih strategi utama yang paling optimal untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Strategi yang paling optimal tersebut memiliki nilai terbesar jika dianalisis dari berbagai aspek. Strategi utama yang paling optimal tersebut adalah melakukan Implementasi *Dana Pania Hindu* pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Dalam simpulannya, Bali menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem terutama dalam mencapai Target SDGs untuk penurunan kemiskinan ekstrem di Bali (0% pada tahun 2024) yang belum tercapai dimana data menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem di Bali masih stagnan di atas 4%. Data menunjukkan bahwa beberapa kabupaten di Bali masih mengalami tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan. Namun,

Kementerian Agama memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan jaringan keagamaan yang luas dan kedekatan dengan masyarakat Bali. Melalui pengembangan program-program sosial yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Agama dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Strategi utama yang diusulkan, yaitu implementasi *Dana Pania Hindu* pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan menawarkan kesempatan untuk memberikan bantuan sosial yang lebih efektif kepada generasi Hindu yang membutuhkan, baik melalui beasiswa maupun bantuan modal usaha. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Langkah selanjutnya adalah dengan menguatkan peran *Pasraman* non formal di Desa Adat, melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui inovasi Tangan Umat (Ketahanan Pangan Umat) dengan melibatkan penyuluh agama bekerjasama dengan PTKN, organisasi non-pemerintah seperti MDA dan PHDI, dan juga sektor swasta, adalah sebuah langkah strategis yang memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali.

Melalui pendekatan di atas, masyarakat dapat lebih terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan

sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Dengan kolaborasi lintas sektor, akan tercipta sinergi yang kuat untuk mengembangkan program-program yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh. Oleh karena itu, langkah ini menjadi penting dalam memperkuat fondasi pembangunan masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan di Bali.

### Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat strategi utama yang diusulkan, kami merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Implementasi *Dana Punia Hindu* pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
  - Membuat surat edaran resmi yang menegaskan komitmen untuk implementasi *Dana Punia Hindu* pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Surat edaran ini dapat memberikan arahan kepada semua pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, organisasi keagamaan (MDA, PHDI), dan lembaga swadaya masyarakat, tentang bagaimana *Dana Punia Hindu* dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali seperti pemanfaatan dana punia untuk Beasiswa dan modal usaha.
  - Mendirikan sebuah tim kerja khusus yang terdiri dari perwakilan Kementerian Agama, tokoh agama Hindu, organisasi non-pemerintah (PHDI dan MDA), dan sektor swasta untuk mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program *Dana Punia Hindu*. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan efisien, serta untuk memantau dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Hindu yang membutuhkan.
- Mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi antara berbagai pihak terkait untuk bertukar informasi, pengalaman, dan ide mengenai implementasi *Dana Punia Hindu*. Hal ini akan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan sinergi dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap program *Dana Punia Hindu* untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat Hindu dan pihak terkait lainnya.
2. Memperkuat peran *Pasraman* non formal di Desa Adat, melibatkan peran aktif partisipasi masyarakat secara luas di tingkat desa adat melalui inovasi Tangan Umat (Ketahanan Pangan Umat)
  - Melakukan Sosialisasi dan Edukasi: Program sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat di tingkat desa adat mengenai pentingnya peran *Pasraman* non formal dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui inovasi Tangan Umat. Melalui kegiatan ini, tingkat



kesadaran dan pemahaman masyarakat akan meningkat, sehingga mereka lebih terbuka untuk aktif berpartisipasi.

- Pendampingan dan Pembinaan: memberikan pendampingan dan pembinaan secara langsung kepada pengurus *Pasraman* non formal di setiap desa adat. membantu mereka untuk mengembangkan program-program inovatif dalam bidang ketahanan pangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- Kolaborasi dan Kemitraan: membangun kerja sama dan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (PHDI, MDA), lembaga swadaya masyarakat, serta sektor

swasta yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan kolaborasi ini, akan lebih banyak sumber daya dan dukungan yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pengembangan *Pasraman* non formal dan implementasi program Tangan Umat.

- Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program Tangan Umat di *Pasraman* non formal. Dengan memantau perkembangan program secara terus-menerus, akan memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan agar program dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

## REFERENSI

### Buku

- Abdullah, I. 2015. *Peran Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia*. Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Prayitno, A., & Hasan, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Royat, Sujana. 2015. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengurangan Kemiskinan.
- Subagyo, A. 2019. *Dinamika Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kemiskinan: Studi Kasus di Bali*. Denpasar: Pustaka Karsa Mandiri.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu*. Jakarta

### Jurnal

- Debrina Vita Ferezagia. (2018). "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, (1) 1.
- Indriani, L., & Pranata, B. (2019). "Implementasi Program Kemiskinan oleh Kementerian Agama di Wilayah Bali". *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 3(2), 85-98.

- Kusuma, D., & Wibowo, A. (2018). "Analisis Efektivitas Kebijakan Kemiskinan Agama dalam Peningkatan Kesejahteraan di Bali". *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 89-104.
- Purwadi, A. (2020). "Peran Kementerian Agama dalam Meningkatkan Literasi Keuangan di Wilayah Bali". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*, 5(1), 45-60.
- Siregar, S. (2021). "Peran Kementerian Agama dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi di Bali". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 123-136.
- Widayati, R., & Pradana, B. (2017). "Peran Kementerian Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali: Tinjauan dari Aspek Sosial-Budaya". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 75-90.

### Website

- Astrie Krisnawati – detikNews. "Pandemi, dan Kemiskinan". <https://news.detik.com/kolom/d-5813394/literasi-keuangan-pandemi-dan-kemiskinan>. Diakses 16 November 2021
- Bappenas. "SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu)". [https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Main\\_Page](https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Main_Page). diakses tanggal 11 Maret 2022.
- Ctta Maya Bali Post. "Selama Pandemi Covid 19, Penduduk miskin Bali bertambah puluhan ribu orang". <https://www.balipost.com/news/2021/02/16/175355/Selama-Pandemi-Covid-19,Penduduk-Miskin...html>. diakses tanggal 16 September 2023
- Eri Sutrisno. "Presidensi G20 Indonesia Angkat Isu Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas". <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4035/presidensi-g20-indonesia-angkat-isu-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas>. Diakses 5 Februari 2022
- Kompas. "Penduduk Miskin di Bali Berkurang". <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/15/penduduk-miskin-di-bali-berkurang>. diakses tanggal 15 Juli 2021
- Liputan 6. "Terlalu Bergantung pada Pariwisata, Pemerintah Bakal Rombak Ekonomi Bali". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4564080/terlalu-bergantung-pada-pariwisata-pemerintah-bakal-rombak-ekonomi-bali> diakses tanggal 22 Mei 2021
- Ridho Al Izzati Junior Researcher, SMERU Research Institute The Conversation. "Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin". <https://theconversation.com/memetakan-kemiskinan-tidak-cukup-hanya-menghitung-jumlah-orang-miskin-82536>. Diakses 5 September 2017